



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG
PARIWISATA KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
26-28 MARET 2021**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
12. Rapat Internal Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021

B. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok isu yang akan menjadi fokus kunjungan spesifik di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan pada umumnya di Kawasan Wisata Borobudur, terkait pemulihan destinasi wisata di antaranya adalah:

1. Perkembangan pembukaaan aktifitas pariwisata
2. Upaya pemulihan pariwisata pada masa Pandemi COVID 19 dan New Normal
3. Penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung perkembangan persiapan pembukaaan aktifitas pariwisata, upaya pemulihan pariwisata pada masa Pandemi COVID 19 dan New Normal, dan Penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*)

D. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata sebagaimana dimaksud di atas, ruang lingkup kunjungan meliputi:

1. Mengkaji kebijakan Kemenparekraf RI dalam menyusun program, kegiatan, dan pendanaan untuk pemulihan pariwisata kawasan wisata selama Pandemi COVID-19 dan New Normal khususnya di Kawasan Wisata Borobudur.
2. Mengkaji kebijakan Pemda terkait di Kawasan Wisata Borobudur dalam mendukung pengembangan dan pemulihan pariwisata di kawasannya selama Pandemi COVID-19 dan New Normal.
3. Mengkaji strategi pelaku pariwisata dalam upaya pemulihan pariwisata di Kawasan Wisata Borobudur.

E. METODE KUNJUNGAN KERJA

Metode kerja yang digunakan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah di antaranya yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan:
 - a. Bupati Magelang.
 - b. Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang;
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang;
 - e. Badan Otoritas Pariwisata Borobudur;
 - f. PT Taman Wisata Candi (TWC);
 - g. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kawasan Wisata Borobudur:
 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
 - Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA)
 - Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)
 - Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO)
 - Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI)
 - Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI)
 - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
 - Hotel Human Resources Manager Association (HHRMA)
 - Himpunan Penulis Pariwisata (HPP)
 - Generasi Pesona Indonesia (GenPI)
 - Perkumpulan Pengemudi Pariwisata Indonesia (Peparindo)
 - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

- dan pemangku kepentingan lainnya untuk memulihkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi COVID-19
 - h. Pejabat Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
2. Tinjauan lapangan obyek-obyek wisata di Kawasan Wisata Borobudur.

F. WAKTU DAN JADWAL

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kawasan Wisata Borobudur kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 26 - 28 Maret 2021.

G. SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Pariwisata merupakan sektor yang paling awal terdampak dan paling akhir dalam pemulihan, sehingga belum bisa maksimal dalam pemulihan iklim kepariwisataan di kawasan Borobudur dan walaupun sudah dilakukan pembukaan kegiatan pariwisata secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat destinasi.
2. Borobudur menjadi salah satu destinasi unggulan program Pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pariwisata Indonesia. Borobudur ditetapkan sebagai 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas melalui surat Sekretaris Kabinet No.B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015. Sebelumnya, Borobudur juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Kementerian Pariwisata menyampaikan kebijakan mengenai 5 destinasi pariwisata superprioritas, yaitu Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
3. Penetapan Borobudur menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas memberikan dampak percepatan pembangunan akses jalan di pedesaan sekitar Borobudur di 20 desa dan sudah menjadi Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang memiliki konsep desa wisata yaitu Desa Borobudur, Desa Ngadiharjo, Desa Wringin Putih, Desa Ngaran 2, Desa Kenalan, Desa Kembang Limus, Desa Karangrejo, Desa Wanurejo, Desa Ngargogondo, Desa Tuksongo, Desa Bumiharjo, Desa Majaksingi, Desa Giri Tengah, Desa Kebonsari, Desa Sambeng, Desa Tanjungsari, Desa Bigaran, Desa Karanganyar, Desa Tegal Arum dan Desa Giripurno.
4. Selama masa Pandemi Covid-19 industri pariwisata di kawasan Borobudur mengalami penurunan sebesar 60 persen, baik dari wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) yang datang,

maupun sektor perhotelan, homestay, restoran dan fasilitas akomodasi lainnya.

5. Target realistis wisatawan yang datang di kawasan Borobudur tahun 2021 adalah 1.404.900 dan untuk tahun 2022 sebanyak 1.475.145 wisatawan yang seluruhnya adalah wisnus.
6. Skema dan daya dukung untuk mencapai target tersebut diantaranya dengan melakukan promosi dan kerjasama dengan biro-biro perjalanan juga promosi melalui sosial media, serta pembenahan berbagai infrastruktur di wilayah Borobudur dan sekitarnya. Serta terus melakukan perbaikan-perbaikan di daya tarik wisata maupun meningkatkan SDM di bidang pariwisata.

B. Permasalahan dan Temuan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepariwisata mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di destinasi super prioritas Borobudur, mendengarkan penjelasan dan mencatat permasalahan dan temuan sebagai berikut:

1. Sertifikasi di destinasi wisata, hotel, maupun tempat lain hanya prosedural dan formalitas, belum menjadi budaya atau kebiasaan baru.
2. Konservasi Candi Borobudur diharapkan tetap dapat memberikan azas kemanfaatan sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang akan meningkat serta menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata yang berbeda dari tempat lainnya.
3. Candi Borobudur merupakan pusat kegiatan wisata, karenanya perlu dipikirkan adanya atraksi wisata alternatif yang mampu menjadi nilai tambah untuk dapat menarik wisatawan.
4. Perlunya memikirkan strategi untuk dapat menambah *length of stay* dan *spend of money* para wisatawan di daerah Kabupaten Magelang yang mempunyai Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas.

C. Pembahasan

Selama masa kunjungan spesifik bidang kepariwisataan di destinasi super prioritas candi Borobudur, tim kunjungan kerja komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/ Lembaga Pendidikan. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik komisi X DPR RI, serta pejabat dari Kemenparekraf RI, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (sambutan dibacakan oleh Sekretaris Daerah)
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur telah didukung dengan Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi memberikan dampak pada Industri Pariwisata di Kab. Magelang dengan tersedianya infrastruktur antara lain berupa jalan yang mempermudah wisatawan mengunjungi Borobudur dan Destinasi Wisata lainnya di Kab. Magelang
 - Besar harapan agar pembangunan destinasi superprioritas Borobudur juga mendukung potensi destinasi wisata unggulan lain di

Kab. Magelang seperti *Nepal Van Java* Desa Butuh, Gardu Pandang Keteb Pas, Silancur *Highland*, Air Terjun Sekar Langit, Wisata Alam Gunung Telomoyo dan Gunung Andong, Pemandian Air Hanyat Candi Umul dll. Sehingga ketika Borobudur menjadi magnet, maka juga akan mempengaruhi destinasi-destinasi lain tersebut.

2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

- Beban Borobudur secara konstruktif maupun jumlah kunjungan wisatawan sudah sangat berat, sehingga diperlukan kreatifitas untuk mengendalikan hal tersebut seperti mengembangkan atraksi wisata alternatif dan memajukan destinasi wisata di sekitar Borobudur sebagai strategi menambah masa tinggal dan belanja (*spend of money*) wisatawan.
- Ada tiga institusi besar yang mempunyai dasar regulasi untuk mengelola kawasan Borobudur, yaitu PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Prambanan; Badan Otorita Borobudur; dan Balai Konservasi Borobudur. Saat ini terdapat wacana agar dibentuk badan pengelola sistem pengaturan tunggal (*single management*) yang memerlukan terobosan dan langkah politik baik penyatuan maupun pilihan lainnya.
- Pembangunan destinasi superprioritas Borobudur ini perlu Kerjasama intensif pelibatan banyak pihak bukan hanya pemerintah, tetapi juga *private sector* dan masyarakat.
- Atraksi wisata lain yang berupa event dan sudah dilakukan adalah Borobudur Maraton. Kedepannya sedang dipersiapkan festival alat musik, semuanya dilakukan dengan konsep *hybrid* dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
- Saat ini Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar 32 M untuk mendorong desa wisata, diantaranya 8 (delapan) desa di Borobudur.
- Dana Hibah Pariwisata dari APBN sebaiknya langsung kepada masyarakat, dilakukan dengan pendampingan yang intensif.
- Borobudur adalah milik dunia, harus memperhatikan *heritage impact assessment*.
- Masyarakat adalah menjadi motor utama pariwisata di kawasan Borobudur.

3. Kepala dinas kabupaten Magelang

- Pembangunan Destinasi Super Prioritas didukung dengan penguatan 20 desa wisata di sekitar kawasan Borobudur dengan total di luar kawasan yaitu 61 desa wisata. Melibatkan masyarakat dalam penataan kawasan Borobudur yang bukan lagi hanya menjadi destinasi tapi jadi magnet pariwisata di sekitar kawasan.
- Perlu kreativitas destinasi sekitar yang akan memperpanjang masa tinggal dan *spend of money* wisatawan.

4. Badan Otorita Borobudur

- Dari master plan kata kuncinya adalah dekonsentrasi kawasan wisata supaya tidak hanya terfokus di Borobudur, sehingga perlu disiapkan *tourism area* yaitu Borobudur – Prambanan – Jogjakarta di dalam *Integreted Tourism Master Plan*. Di kawasan Borobudur sudah dilakukan, yaitu dengan pembuatan gerbang-gerbang besar yang bisa menjadi titik-titik penyebaran tamu wisata.
- Pemerintah sudah membuat infrastruktur besar yaitu Yogyakarta Internasional Airport, dan jalan tol. Dengan adanya dua infrastruktur besar ini maka kunjungan wisata luar biasa besar. YIA kapasitasnya 20 (dua puluh) juta penumpang dalam satu tahun, dalam masa pandemi bisa sampai dengan 10-12 juta penumpang. Jalan Tol yang saat sedang dalam proses kapasitas dalam masa pandemi hingga 12 juta. Besarnya potensi kunjungan wisata dari dua infrastruktur ini harus bisa diserap.
- Fokus Badan Otorita tidak langsung di dalam Candi Borobudur namun di daerah penyangga karena sudah ada PT TWC dan Balai Konservasi. Untuk pembangunan infrastruktur juga dalam kewenangan PUPR.
- Tugas koordinatif BOB antara lain kerja sama yang erat dengan Pemprov. Jateng dan DIY untuk menyerap besarnya jumlah kunjungan wisata di kawasan Borobudur serta memperhatikan aksesibilitas, atraksi, amenities. Aksesibilitas: bekerja sama dengan PUPR, GIPI serta asosiasi yang lain untuk membuat travel pattern yang jelas, sehingga wisatawan yang datang dari berbagai pintu dengan berbagai variasi durasi wisata bisa kemana saja. Atraksi: menyatukan kalender of event, supaya tamu tidak datang hanya untuk satu event festival saja sehingga diharapkan bisa menambah length of stay. Amenitas: membuat kawasan sesuai Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi yaitu Borobudur *High Land* yang berada di Purworejo dengan luas lahan 309 hektar, master plan dan DED sudah siap namun untuk dapat melakukan pembangunan masih sulit karena jalur jalan dari Purworejo dan Kulonprogo menuju lokasi masih sangat kecil sedangkan kemampuan anggaran pemkab disana masih belum bisa melakukan perbaikan, maka diajukan permohonan ke PUPR dan eksekusi konstruksi baru bisa tahun 2022.
- Harapannya pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat dilakukan paling tidak 50% agar di dalam kawasan *Borobudur High Land* bisa dimulai karena dengan jalan yang sekarang alat berat sulit masuk.
- Pelatihan-pelatihan kepada lingkungan masyarakat di sekitar kawasan *Borobudur High Land* jadi ketika kami membangun, SDM sudah siap dan masyarakat dapat dilibatkan untuk keperluan logistik dan tenaga kerja.

5. PT Taman Wisata Candi (TWC)

- Penetapan Borobudur menjadi DWSP diharapkan menjadi payung besar untuk kementerian dan lembaga melakukan program kerjanya dalam menterjemahkan Super Prioritas itu bisa terwujud.
- Melalui kerja sama semua pihak, pertumbuhan ekonomi sudah mulai terlihat terutama yang berbentuk UMKM dimana sudah ada bisnis-bisnis baru yang melibatkan masyarakat.
- PUPR sudah melakukan pembangunan infrastruktur besar di sekitar kawasan Borobudur yang masuk ke desa-desa wisata sehingga memberikan akses kemudahan pergerakan tidak terpusat di Candi Borobudur sehingga ekonomi mulai menggeliat di sekitar kawasan Candi Borobudur, di jalur utama juga sudah muncul bisnis-bisnis baru.
- Kementerian BUMN berkontribusi membangun balkondes yang fokusnya ekonomi pedesaan, harapannya ada kolaborasi dengan institusi desa dengan pembinaan BUMDes.
- 2019 pencapaian pariwisata tertinggi di Borobudur dan sekitarnya, kunjungan hampir 4 (empat) juta orang, dan pemerataan ekonomi sudah mulai tumbuh. Sayangnya di 2020 terjadi pandemi.
- Di tahap ke dua adalah pembangunan peningkatan skala pasar ini, misalnya infrastuktur dasar seperti bandara YIA dan yang signifikan nanti adalah exit tol Palbapang dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) juta orang yang merupakan akses langsung ke kawasan Borobudur dan bukan jalan tembus ke daerah lain.
- Diperlukan respon atas infrastruktur dasar tersebut pada tahun-tahun berikutnya, pendistribusian aspek ekonomi atas datangnya potensi yang lebih besar ke area Candi Borobudur yang merupakan magnet utama, karena wisatawan akan berkunjung ke borobudur dulu, baru menyebar ke destinasi lain.
- Isu terkait konservasi sedang dibahas dengan Dirjen Kebudayaan untuk mencari solusi yang tepat dalam merumuskan keseimbangan antara konservasi dan kemanfaatan Candi Borobudur yang menjadi magnet utama pariwisata.
- Karakter wisatawan adalah enggan untuk berpindah moda, saat sudah di satu area yang nyaman cenderung akan bertahan di satu titik saja. Kami sedang berencana membuat suatu program bagaimana membawa wisatawan dengan jumlah yang signifikan ke titik (destinasi wisata) yang lain, salah satu yang potensial adalah Menoreh karena berada diantara kawasan High Land dan Borobudur.
- Mengenai Badan Pengelola, PT TWC sebagai BUMN hanya operator, jika ada lembaga baru yang menampung unsur-unsur sesuai UU Cagar Budaya agar ditentukan secara jelas fungsinya sebagai regulator atau pelaksana sehingga dalam menjalankan fungsinya dapat berjalan secara maksimal. Terpenting dalam pembuatan lembaga baru ini visinya adalah tetap sesuai arahan presiden yaitu membuat Borobudur sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas.

- Di Kementerian BUMN sedang berproses dalam membentuk holding pariwisata dan pendukungnya.
6. Syahrudin, perwakilan pelaku wisata:
- Ketika KSPN Borobudur ini berkembang maka ada gap, terutama di sektor SDM yang perlu ditingkatkan. Pelaku wisata lokal dan Pemkab serta Pemprov butuh dukungan, akan ada kesenjangan juga di bidang pemasaran dengan privat sektor yang melakukan investasi. Hotel bintang tiga kami sarankan untuk tidak dizinkan karena akan menghantam home stay.
 - Dengan ditutupnya akses wisatawan untuk naik ke Candi Borobudur mempengaruhi pertimbangan mereka untuk datang, padahal datangnya wisatawan ke Borobudur membantu atraksi wisata lainnya seperti Keteb Pas, Arung Jeram, wisata Sumbing dll.
 - Gunung Sumbing yang indah dapat diusulkan untuk menjadi *travel patern* baru di kawasan magelang, dalam waktu dekat kita akan mengajak INTOA.
7. Kirno Prasajo, Pesona Magelang:
- Dampak pandemi sangat dirasakan biro perjalanan, dalam rangka pemulihan harapannya melibatkan organisasi dan masyarakat sebagai wisatawan yang perlu didengar keinginannya.
 - Pelaku pariwisata yang terlibat di kawasan Borobudur sangat banyak sekali yaitu pemerintah dari tingkat pusat, daerah hingga masyarakat, yang dibutuhkan sebenarnya hanya koordinator agar perkembangan kawasan Borobudur bisa sinkron.
 - Diperlukan program yang langsung dirasakan masyarakat walaupun sederhana. Misalnya pendidikan/pelatihan untuk dapat diperbantukan oleh TWC, Balai Konservasi melakukan kerja dengan forum yang ada di masyarakat untuk menampung wisatawan yang turun dari Candi, dll.
8. Soni, HPI Kab. Magelang, Forkom Desa Magelang:
- Euforia pembangunan di Kawasan Borobudur misalnya banyak dibangun homestay, sedangkan SDM belum memadai, dikawatirkan jika pelayanan yang didapatkan wisatawan menjadi tidak sesuai dengan standar operasional/prosedur.
 - Kemenparekraf sebaiknya melakukan pelatihan peningkatan kemampuan untuk menambah ilmu yang dapat diimplementasikan di desa-desa yang telah dibangun balkondes yang dapat mengangkat ekonomi masyarakat.
 - Tour Guide yang sudah tersertifikasi dan memiliki legal formal baru 70 orang, berharap pemerintah dapat melakukan pembelajaran tingkat dasar untuk Tour Guide agar bisa melakukan sertifikasi kemudian KTHP.

- Biaya sertifikasi Tour Guide cukup besar, saat ini organisasi hanya mampu melakukan pembinaan kepada masyarakat secara volunteer terkait bahasa dan etika pariwisata.
9. Alfian, Ketua Forum Daya Tarik Wisata Magelang:
- Kawasan Borobudur terlalu sempit dan *crowded* jika dilihat dari gerbang masuk yaitu Palbapang, Blondo, Kembanglimus dan Jagalan. Infrastruktur jalur masuk Magelang seperti dari Salatiga, Boyolali dan Secang harapannya juga diperhatikan agar menjadi pintu ke Borobudur dengan menikmati lereng Gunung Merapi dan Merbabu, sehingga Jogja dan Solo menjadi destinasi setelah dari Borobudur.
 - Sebagian besar destinasi wisata di dekatar Borobudur belum mampu menampung rombongan bus dalam jumlah besar.
10. Komisi X DPR RI melalui Ir. H. Nuroji, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., Bramantyo Suwondo, M.M.IR., menyampaikan hal-hal antara lain:
- Peningkatam SDM sangat penting.
 - Terkait Tour Guide: apakah masuk candi wajib didampingi? Karna tarifnya terlalu mahal, story tellingnya harus diperbaiki.
 - Desa Wisata harus dipersiapkan SDM dari warga desa sendiri.
 - Dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur sebaiknya mempertahankan tradisi budaya lokal serta tidak merubah kontur dan kondisi alam.
 - Konservasi Candi Borobudur harus diperhatikan, diperlukan terobosan dalam pembangunan dan pengembangan misalnya dibuat menara pandang atau gondola.
 - Diperlukan atraksi budaya yang berkesan
 - Harus disiapkan titik-titik untuk mengakomodasi UMKM.
 - Rapat kerja bersama antar Kementerian dan Lembaga diperlukan untuk sinkronisasi dan monitoring

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, tim kunjungan kerja spesifik Bidang Kepariwisata Komisi X DPR RI ke destinasi super prioritas Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Borobudur memiliki tiga institusi besar yang mempunyai dasar regulasi untuk mengelola kawasan Borobudur yaitu PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Prambanan, Badan Otorita Borobudur, dan Balai Konservasi Borobudur serta masih akan ada Badan pengelola sebagaimana amanat Pasal 97 UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sampai saat ini belum terbentuk.
2. Penyebaran wisatawan ke destinasi wisata di sekitar Candi Borobudur menjadi prioritas pengembangan dan pembenahan pariwisata di Kawasan candi Borobudur.
3. Pembangunan kawasan strategis Borobudur yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah harapannya dapat mendukung pertumbuhan potensi wisata di

Magelang seperti Nepal van Java, Gardu Pandang Keteb Pass, Silancur Highland, Air Terjun Sekarlangit, wisata alam Gunung Telomoyo dan Gunung Andong, pemandian air hangat Candi Umbul dan lainnya.

4. Pembangunan destinasi wisata super prioritas harus disertai dengan peningkatan SDM dan memberdayakan masyarakat setempat, menjunjung tinggi kearifan lokal, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
5. Pengembangan desa wisata mengunggulkan potensi daya tarik wisata baik yang bersifat fisik (keunikan persawahan, perkampungan, dan sebagainya), serta menampilkan potensi non fisik (adat tradisi budaya yang unik dan khas) yang dapat dikembangkan untuk daya Tarik kunjungan wisatawan ke desa wisata.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja spesifik bidang kepariwisataan Komisi X DPR RI ke Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan rapat koordinasi antar kementerian terkait (Kemenparekraf RI, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan Kemendikbud Ristek RI) untuk dilakukan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan serta sebagai bentuk monitoring atas program terkait kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Borobudur.
2. Dalam pembentukan badan pengelola harus melibatkan semua *stakeholder* mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) hingga unsur masyarakat.
3. Mendorong penerapan pendekatan *sustainable tourism* dimana mengedepankan prinsip-prinsip sosial dengan fasilitasi dan peningkatan SDM masyarakat sekitar destinasi wisata sehingga terlibat dan ikut dalam menghidupkan potensi-potensi lokal yang ada serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke destinasi super prioritas Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti permasalahan, temuan, dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke destinasi super prioritas Borobudur di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Jakarta, 29 Maret 2021
Ketua Tim,

Ttd.
Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444